BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang Milik Daerah (BMD) adalah suatu aset yang sangat penting yang dimiliki pemerintah daerah yang berfungsi untuk mendukung pelayanan publik yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BMD dapat dikategorikan berdasarkan kriteria, meliputi aset bergerak, aset tidak bergerak, aset operasional, aset infrastruktur, aset pembelian, aset hibah, aset hasil produksi, aset milik pihak ketiga, aset berharga tinggi, dan aset berharga rendah. Dengan adanya BMD di pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai inovasi dan perubahan dalam tata kelola pemerintahan salah satunya dalam pengelolaan BMD. Inovasi dalam pengelolaan BMD dengan menggunakan berbagai macam aplikasi berupa website seperti SIMASET, SIPD-RI, SIDIA, dan SRIKANDI. Aplikasi tersebut mempunyai tujuan dan tugas masing-masing. Dengan adanya aplikasi yang tersedia dapat memudahkan dalam pengerjaan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pengamanan BMD pemerintah daerah menggunakan website SIMASET untuk pengamanan disetiap OPD sehingga dapat diakses dimanapun dengan mudah dan cepat.

Walaupun teknologi sudah berkembang pesat masih memerlukan pengamanan dan pemeliharaan aset daerah secara terstruktur. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten No. 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, yang meliputi: Pengadaan BMD, Penggunaan BMD, Pemanfaatan BMD, Pengamanan dan Pemeliharaan BMD, Evaluasi BMD, Pemindahtanganan BMD, Pemusnahan BMD, Penghapusan BMD, Pengelolaan BMD, Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BMD. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut peneliti tertarik untuk membahas pengamanan dan pemeliharaan aset daerah. Pengamanan BMD dan pemeliharaan aset daerah merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mengoptimalkan BMD, agar memastikan kelangsungan terhadap penggunaan aset daerah. Pengamanan BMD dan

pemeliharaan aset daerah mencakup berbagai jenis aset, seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, dan peralatan yang diperlukan untuk operasional pemerintah. Pengamanan BMD merupakan langkah-langkah preventif yang dilakukan untuk menjaga agar aset daerah dalam keadaan yang baik sehingga dapat digunakan sesuai fungsinya. Pemeliharaan aset daerah yang rutin dan terencana juga diperlukan untuk memastikan bahwa aset daerah tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan nilai. Selain itu, pengamanan BMD dan pemeliharaan aset daerah yang efektif dapat meningkatkan nilai aset daerah dan mengurangi risiko kerugian.

Meskipun telah ditetapkan peraturan untuk Pengamanan BMD dan Pemeliharaan Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Klaten atau (BPKPAD) Kabupaten Klaten masih menghadapi tantangan yang signifikan di lapangan, sehingga mengakibatkan pengamanan BMD yang berpotensi buruk. Jika BPKPAD Kabupaten Klaten terjadi kegagalan dalam mengamankan aset yang berpotensi, akan mengakibatkan pengamanan aset daerah tidak efektif dan efisien. Pemeliharaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten harus diselenggarakan secara sistematis serta terencana dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Permasalahan pada BPKPAD Kabupaten Klaten adalah bahwa peraturan untuk pengamanan BMD dan pemeliharaan aset daerah tidak dilaksanakan secara optimal sehingga adanya penggunaan BMD yang tidak tepat. Selain itu, masih banyak aset tetap yang sudah dibangun rumah tetapi belum ada bukti kepemilikan tanah. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya prosedur pengamanan dan pemeliharaan aset daerah yang optimal. Prosedur pengamanan BMD dan pemeliharaan aset daerah yang baik akan memastikan bahwa BMD dapat dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengamanan dan pemeliharaan BMD di BPKPAD Kabupaten Klaten yang sampai saat ini belum optimal. Oleh karena itu, pengamanan BMD dan pemeliharaan aset daerah harus dilakukan dengan baik agar mencegah kerugian dan penurunan nilai saat aset digunakan. Sehingga peneliti dapat memberikan judul **“PROSEDUR PENGAMANAN BMD dan PEMELIHARAAN ASET DAERAH di BPKPAD KABUPATEN KLATEN”**.

1.2 Cakupan Pembahasan

Berdasarkan latar belakang pertimbangan dalam pemilihan fokus kajian tugas akhir yang telah dijabarkan di atas, pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana prosedur pengamanan BMD di BPKPAD Kabupaten Klaten agar optimalisasi pengamanan sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016?
2. Apakah pemeliharaan aset daerah sudah dilakukan secara optimal di BPKPAD Kabupaten Klaten?
3. Apakah aplikasi yang digunakan untuk mengamankan BMD di BPKPAD Kabupaten Klaten sudah efektif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang diajukan terhadap BPKPAD Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pengamanan BMD yang terjadi pada BPKPAD Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 dan telah dilakukan secara optimal sehingga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui optimalisasi pelaksanaan dalam pemeliharaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten .
3. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan aplikasi di aset daerah yang digunakan dalam pengamanan BMD di BPKPAD Kabupaten Klaten.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain itu adapun manfaat penelitian yang akan dijelaskan oleh penulis, yaitu:

1. Bagi penulis, manfaat penelitian ini adalah memberikan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih baik terkait dengan prosedur pengaman BMD dan pemeliharaan aset daerah sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempraktikkan ilmu mata kuliah yang sudah didapat di perguruan tinggi.
2. Bagi BPKPAD Kabupaten Klaten, penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk mengoptimalkan terkait prosedur pengamanan BMD dan pemeliharaan aset daerah, sehingga dapat mengetahui masalah yang telah menghambat pengamanan dan pemeliharaan aset daerah.

3. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan untuk menjadi referensi penelitian berikutnya.
4. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi tentang manajemen aset daerah khususnya mengenai pengamanan aset daerah.